

ABSTRAK

Kepailitan merupakan upaya kreditor untuk mendapatkan pembagian utang yang dimiliki debitor secara adil. Buruh memiliki kedudukan dalam Kepailitan, yaitu sebagai Kreditor Preferen. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa upah pekerja mendapatkan pemenuhan terlebih dahulu dalam hal suatu perusahaan dinyatakan Pailit. Dengan demikian, maka pekerja dapat menjadi pemohon pailit apabila terdapat upah yang menunggak dan tidak dibayarkan oleh Pemberi Kerja (telah jatuh tempo). Pekerja tidak perlu menunggu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) terlebih dahulu untuk menagih upah yang tidak dibayarkan, apabila telah memenuhi syarat Kepailitan secara sederhana dan terbukti bahwa tidak terdapat sengketa Upah Buruh Terutang antara buruh dan Pemberi Kerja, maka Buruh dapat langsung mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga. Dengan dibuktikannya hal tersebut, maka permohonan pailit tidak bersifat prematur lagi.. Dalam skripsi ini akan membahas mengenai legal standing buruh dalam mengajukan permohonan pailit tanpa putusan PHI, dan penghitungan buruh sebagai pemohon pailit yang diwakili oleh Serikat Pekerja nya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu buruh dapat mengajukan permohonan pailit apabila telah memenuhi syarat sederhana Kepailitan, untuk membuktikan keabsahan jumlah upah pekerja yang akan dijadikan sebagai obyek permohonan pailit, pekerja dapat menjadikan Pasal 28 Permenaker No. 33 Tahun 2016. Dan dalam hal mengajukan permohonan pailit, buruh dihitung sebagai subyek individu, meskipun diwakili oleh Serikat Pekerja.

Kata Kunci: Kreditor Preferen, Permohonan Pailit Prematur, Putusan PHI, Upah Buruh, Serikat Pekerja.

ABSTRACT

Bankruptcy is an attempt by creditors to get a fair share of debt owned by the debtor. Labor has a position in Bankruptcy, namely as a Preferred Credit Creditor. This is regulated in Article 95 paragraph (4) of Labour Laws which states that workers' salary get fulfilled first if that a company is declared bankrupt. Thus, the worker can become a bankrupt applicant if there is a salary in arrears and is not paid by the Employer (due). Workers do not need to wait for the Industrial Relations Court Decision (PHI) in advance to collect unpaid wages, if they have fulfilled the Bankruptcy requirements simply and are proven that there is no dispute in labor wages between workers and employers, then workers can immediately submit bankruptcy requests to Commercial Court. With this proven, the application for bankruptcy is no longer premature. In this research will discuss the legal standing of workers in filing for bankruptcy without a PHI decision, and the calculation of workers as bankrupt applicants represented by their Trade Unions. This writing uses normative juridical legal research methods with a statute approach, conceptual approach, and case approach. The results of research conducted by the author that workers can apply for bankruptcy if they meet the simple requirements of bankruptcy, to prove the validity of the amount of workers' wages to be made the object of bankruptcy applications, workers can make Article 28 of the Minister of Manpower Decree No. 33 of 2016. And in the case of filing for bankruptcy, workers are counted as individual subjects, even though they are represented by trade unions.

Keywords : Preferred Creditor, The Premature Bankruptcy Request, Decision of PHI, Workers wages, Labor union.